A person wearing a bright yellow dress and a red hat is standing on a stage, possibly performing or speaking. They are positioned in front of a dark railing.

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan SPIP.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun suatu Desain Penyelenggaraan SPIP. Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini memuat informasi tentang unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan informasi yang disajikan ini, seluruh pejabat dan pegawai diharapkan mempunyai kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Harapan kami, desain ini tidak hanya menjadi dokumen kerja saja, namun diharapkan bisa menjadi acuan atau panduan dalam pengembangan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, **Juní** 2019
Kepala
Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. AZRAL
Nip. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II Sekilas Tentang SPIP.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Tujuan SPIP.....	4
C. Unsur-unsur SPIP.....	5
1. Lingkungan Pengendalian	
2. Penilaian Resiko	
3. Aktivitas Pengendalian	
4. Informasi dan Komunikasi	
5. Pemantauan Berkelanjutan	
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	8
BAB III Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.....	9
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik.....	9
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini.....	9
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	11
BAB IV Risiko dan Kegiatan Pengendalian.....	14
A. Pernyataan Tujuan.....	14
B. Risiko-risiko.....	14
C. Pengendalian Terpasang.....	17
D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.....	20
BAB V Informasi dan Komunikasi.....	21
BAB VI Pemantauan dan Evaluasi.....	24
BAB VII Penutup.....	25
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, tugas pokok yang diemban oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di

lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/56/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2019.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko

dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip berhati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam

pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Infomasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian

Itam yang ada, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pekalongan memandang perlu melakukan aksi penyelenggaraan SPDP setiap
tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan
penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas
penyelenggaraan SPDP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung
penyelenggaraan SPDP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPDP. Hal ini
dibuktikan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan
sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ; Seluruh lingkup Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan (1 Sekretariat dan 3 bidang) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya	Cukup Memadai

	manusia	
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau

	pelanggaran terhadap aturan kode etik.
--	--

II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan

V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, berakadab pelaksanaan keuangan, pengamanan aset negara dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2019, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang terdapat dalam Rencana Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Sehat;
2. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah;
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

1. Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah
2. Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bintek, tidak semua peserta menerapkan hasil bintek tersebut
3. Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah, peserta yang datang tidak sesuai dengan kriteria yang diundang
4. Adanya kekhawatiran pengurus koperasi bahwa dengan adanya kegiatan ini akan mempersalahkan bantuan dana yang mereka terima
5. Sebagian pelaku UMKM yang di kirim mengikuti Pelatihan tidak sesuai dengan pelaku UMKM yang sudah didata / diidentifikasi sehingga tidak tercapainya kasaran dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM dalam mengembangkan

usaha.

6. Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah
7. Rendahnya motivasi UMKM untuk mengikuti temu mitra dan sosialisasi. Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk diinput keaplikasi SIKP-KUR
8. Rendahnya produktifitas, nilai tambah dan rendahnya kualitas produk sehingga produk unggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kurang dikenal di tingkat nasional maupun internasional

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

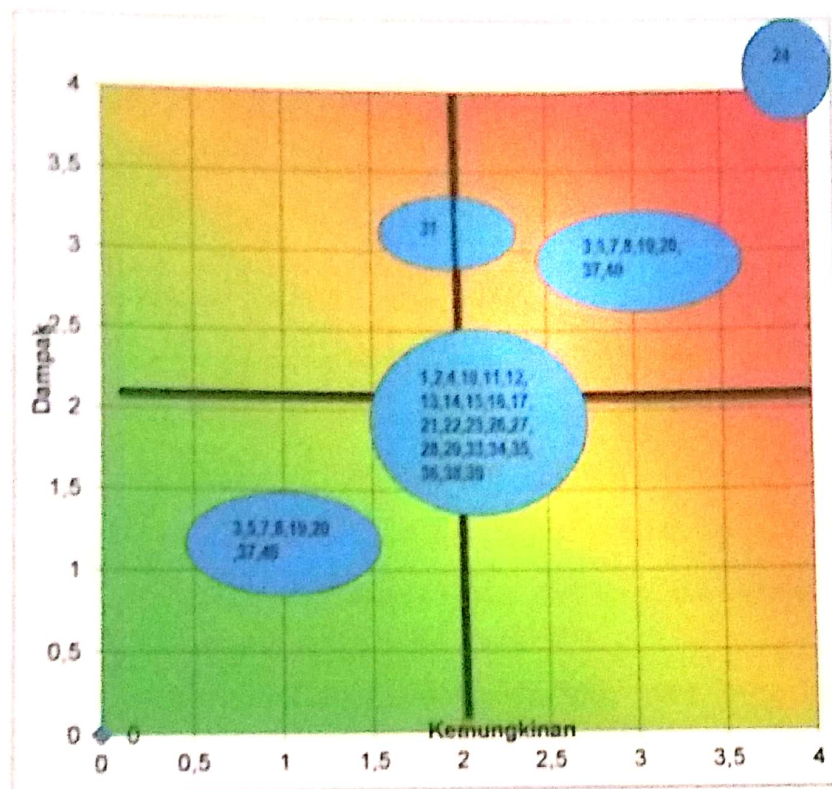
- 1 Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat
- 2 - Tidak terdatanya seluruh IKM yang ada
- 3 IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.
- 4 RPIK Pesisir Selatan kurang sosialisasi terutama pada OPD terkait (tingkat II dan kecamatan) serta masyarakat pelaku IKM
- 5 IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham
- 6 Metode pembinaan dan pengawasan yang diberikan tidak efektif
- 7 Tidak adanya IKM yang bermitra
- 8 IKM tidak konsisten menerapkan metode / teknik produksi baru yang diberikan pada saat Bimtek Teknologi industri
- 9 Sentra tidak bertahan lama dan penyelenggaraan sentra nantinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 10 Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan
- 11 Tidak selesainya pengurusan administrasi DAK sesuai target yang diharapkan

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- 1 Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan
- 2 Tidak selesainya pengurusan administrasi DAK sesuai target yang diharapkan
- 3 Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan
- 4 Tidak selesainya pengurusan administrasi DAK sesuai target yang diharapkan

- 5 Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan
- 6 Tidak terselesaikan pengurusan administrasi DAK sesuai target yang diharapkan
- 7 Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan
- 8 Tidak terselesaikan pengurusan administrasi DAK sesuai target yang diharapkan
- 9 Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpadang

Sampai saat ini, Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain

sebagai berikut :

- 1 Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta sosialisasi
- 2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi
 - Melaksanakan bimtek dan sosialisasi tentang Peraturan Pengawasan Koperasi, Bimtek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, melakukan pengawasan koperasi.
- 3 Kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta bimtek
- 4 Kegiatan Revitalisasi Koperasi/KUD
 - Peraturan menteri koperasi tentang pembinaan perkoperasian
- 5 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti diklat.
- 6 Kegiatan Pendataan dan Validasi Data UMKM
 - Dibuatkan format isian data yang harus dilengkapi UMKM
- 7 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
 - Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti temu mitra dan sosialisasi, serta kriteria calon debitur KUR
- 8 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - Identifikasinya UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi
- 9 Kegiatan Pemutakhiran Data IKM
 - Melakukan pendataan langsung lapangan
- 10 Kegiatan Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM
 - Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan
- 11 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK)
 - Koordinasi dengan tim teknis
- 12 Kegiatan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
 - Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan
- 13 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
 - Diagnosa dan analisa permasalahan IKM
- 14 Kegiatan Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta/BUMN/BUMD

- Pendataan IKM yang difasilitasi informasi kemitraan melalui temu usaha, IKM yang difasilitasi kemitraan dan IKM yang bermitra
- 15 Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri kepada IKM
 - Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan
- 16 Kegiatan penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan
 - Telah terbentuknya beberapa kelompok Industri dan sentra yang sudah berlegalitas
- 17 Kegiatan Pembangunan Sentra IKM (DAK)
 - Menyediakan biaya Penunjang Pembangunan Gedung Sentra IKM
- 18 Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM(penunjang DAK)
 - Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder
- 19 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Pemantauan berkala
- 20 Kegiatan Pelayanan Administrasi, Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar
 - Dilakukannya pemantauan petak / kios yang kosong / tidak dihuni oleh pedagang karena rusak atau
- 21 Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar
 - Dilakukan pengawasan terhadap pegelola pasar
- 22 Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI
- 23 Kegiatan penunjang percepatan pembangunan pasar dalam Kabupaten pesisir selatan.
 - Dilakukannya percepatan pembangunan sarana penunjang fisik utama
- 24 Kegiatan Pembuatan database perdagangan
 - 'Melakukan pendataan langsung kelapangan
- 25 Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten (DAK)
 - dilakukannya penyelesaian administrasi pembebasan lahan
- 26 Kegiatan Penyelenggaraan Painan Ekspo
 - Merencanakan produk unggulan yang akan diikutsertakan dalam evant yang akan datang.
- 27 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa
 - Melakukan pengawasan barang beredar setiap bulannya,
- 28 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah

- Melengkapi peralatan operasional kebutuhan Terra Ulang
- 29 Kegiatan Pemantauan Harga dan Operasi Pasar
- Melakukan pembinaan kepada pedagang yang menjual harga diatas kewajaran

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- 1 Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - Surat
- 2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 3 Kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - pertemuan
- 4 Kegiatan Revitalisasi Koperasi/KUD
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 5 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 6 Kegiatan Pendataan dan Validasi Data UMKM
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 7 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 8 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 9 Kegiatan Pemutakhiran Data IKM
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 10 Kegiatan Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM

- surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 11 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK)
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 12 Kegiatan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 13 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 14 Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta/BUMN/BUMD
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 15 Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri kepada IKM
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 16 Kegiatan penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 17 Kegiatan Pembangunan Sentra IKM (DAK)
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 18 Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM(penunjang DAK)
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 19 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Menghubungi dan memantau langsung ke lokasi
- 20 Kegiatan Pelayanan Administrasi, Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar
 - Karcis (barang kuasi), kwitansi/ pembayaran
- 21 Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar
 - Pemantauan langsung
- 22 Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

- Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KUA/PPAS.
- 23 Kegiatan penunjang percepatan pembangunan pasar dalam Kabupaten pesisir selatan.
- Pembuatan DED, rapat - rapat persiapan akan dimulainya pekerjaan
- 24 Kegiatan Pembuatan database perdagangan
- Melakukan pendataan langsung kelapangan
- 25 Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten (DAK)
- Pembuatan DED, rapat - rapat persiapan akan dimulainya pekerjaan
- 26 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Ekspo
- Brosur, Media Elektronik, Media Massa
- 27 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- Surat Edaran Kebutuhan barang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan
- 28 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
- Sosialisasi kepada pedagang tentang Terra Ulang
- 29 Kegiatan Pemantauan Harga dan Operasi Pasar
- Papan Informasi Harga, Sosialisasi, Media Sosial

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Kabupaten Pesisir Selatan

BAB VII

PENUTUP

Salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini tertuang pada Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Kepala Dinas

Koperasi,UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian

Drs. AZRAL

NIP.19621231 198602 1 039

IDENTIFIKASI RISIKO

SKPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.	Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah	Kasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Ketika adanya pemilihan pengurus koperasi, masalah pendidikan sering diabaikan	Tidak semua materi bisa dipahami dengan cepat dan maksimal oleh Peserta sehingga masih rendahnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai prinsip prinsip perkoperasian
2.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian	Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bimtek, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Ilmu yang didapatkan sering tidak diterapkan pada koperasi	Kemampuan SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola masih rendah, sehingga belum mampu untuk menyusun SOP, SOM, ART, Persus.
		Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Belum adanya sosialisasi Permenkop no. 9 tahun 2018 tentang pembinaan dan penyelenggaraan koperasi	Rendahnya kesadaran pengurus dalam peningkatan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi
3.	Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Meningkatnya pengetahuan dan akuntabilitas Pengurus Koperasi dalam mengelola keuangan koperasi	Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah, peserta yang datang tidak sesuai dengan kriteria yang dundang	Kasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Ketika adanya pemilihan pengurus koperasi, masalah pendidikan sering diabaikan, banyaknya pengurus koperasi yang berkriteria kecil kecenderungan melaksanakan tugas rangkap	peserta belum memahami materi yang disampaikan narasumber sehingga koperasi-koperasi belum bisa menyajikan laporan keuangan yang baik
4.	Revitalisasi Koperasi/KUD	Meningkatnya koperasi tidak aktif mejadi aktif, aktif menjadi berkualitas dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	Adanya kekhawatiran pengurus koperasi bahwa dengan adanya kegiatan ini akan mempersalahkan bantuan dana yang merka terima	Kasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Rendahnya kesadaran Pengurus Koperasi untuk mengelola koperasi dengan baik dan transparan	Kegiatan Revitalisasi Koperasi terlaksana, namun peningkatan koperasi tidak aktif menjadi aktif sangat sulit dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

5.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatkan kemampuan Berwirausaha bagi para UMKM. Menciptakan SDM UMKM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha agar dapat membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula serta mengembangkan home industri	Sebagian pelaku UMKM yang di kirim mengikuti Pelatihan tidak sesuai dengan pelaku UMKM yang sudah didata / diidentifikasi sehingga tidak tercapainya sasaran dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.	Kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah	sebagian UMKM tidak termotivasi karena tidak mendatangkan manfaat secara langsung	Tidak tercapainya tujuan secara maksimal
6.	Pendataan dan Validasi Data UMKM	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha per sub sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelaku UMKM beranggapan kalau hal ini akan berhubungan dengan perpajakan	Validasi data belum sepenuhnya akurat
7.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya informasi permodalan bagi UMKM	Rendahnya motivasi UMKM untuk mengikuti temu mitra dan sosialisasi. Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk diinput ke aplikasi SIPK KUR	Kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM menganggap temu mitra dan sosialisasi tidak berdampak dan mendatangkan manfaat secara langsung bagi mereka	Tujuan kurang tercapai
8.	Memfasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM di bidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Rendahnya produktivitas, nilai tambah dan rendahnya kualitas produk sehingga produk unggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kurang dikenal di tingkat nasional maupun internasional	Kategori Usaha Mikro kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha (meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk)	kurang berkembangnya dan dikenalnya produk unggulan daerah
9.	Pemutakhiran Data IKM	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat - Tidak terdapatnya seluruh IKM yang ada	Kategori Pengendalian dan pengawasan Industri	- IKM tumbuh sendiri dan kurangnya koordinasi dengan dinas - Lokasi IKM tersebar	Tidak tersedianya Data Base IKM yang akurat

10.	Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan di tingkat nasional maupun internasional.	Pelaku usaha dan Kasi pengembangan teknologi industri	Teknologi / peralatan yang digunakan belum optimal	Omset IKM dan skala usaha tidak meningkat melalui promosi/ pameran dan pelatihan Dekranasda
					Produk yang kurang inovasi serta pola pikir pelaku IKM yang belum memahami pentingnya	
					- Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	
11.	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Terbitnya Perda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Pesisir Selatan 2019-2039	RPIK Pesisir Selatan kurang sosialisasi terutama pada OPD terkait (tingkat II dan kecamatan) serta masyarakat pelaku IKM	Kasi Pengembangan Teknologi Industri	Kurangnya pemahaman tentang RPIK oleh stakeholder terkait	Waktu penyelesaian RPIK hingga diterbitkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan
12.	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pelaku usaha dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	Legalisasi dan sertifikasi produk IKM jadi tidak efektif dalam meningkatkan mutu produk
13.	Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan - permasalahan tersebut.	Metode pembinaan dan pengawasan yang diberikan tidak efektif	Pelaku IKM	Kurangnya pengetahuan pelaku IKM mengenai standar produksi dan kualitas produk yang baik dan bernilai tinggi	Kualitas IKM, pelaku IKM serta produk IKM tidak meningkat
				Kasi Pengendalian dan pengawasan industri	Kurangnya personil yang terampil mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan	

14	Facilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta/BUMN/BUMD	Meningkatnya Skala Usaha dan Permodalan IKM melalui Kemitraan	Tidak adanya IKM yang bermitra	Pelaku IKM	Citra buruk/ kurang baik IKM-IKM mitra pada tahun sebelumnya menyebabkan menurunnya kepercayaan Bapak angkat/ pihak yang bermitra terhadap IKM- IKM saat ini	Facilitasi kemitraan tidak efektif dalam meningkatkan skala usaha dan permodalan IKM secara keseluruhan
					Rendahnya minat pelaku IKM untuk bermitra	
15	Pembinaan kemampuan teknologi industri kepada IKM	Meningkatnya sumber daya IKM dibidang teknologi industri	IKM tidak konsisten menerapkan metode / teknik produksi baru yang diberikan pada saat Bimtek Teknologi Industri	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan Teknologi Industri	- IKM cepat merasa puas dengan metode dan hasil yang sekarang serta kurang inovasi dan kreasi untuk membuat produk yang lebih berkualitas dan bernilai tambah	Upgrade/ peningkatan pengetahuan proses produksi pelaku IKM dalam hal pemanfaatan teknologi industri jadi kurang efektif
16	Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Sentra tidak bertahan lama dan penyelenggaraan sentra nantinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kelompok IKM belum terorganisir dengan baik	Stag-nya pertumbuhan kelompok dan sentra IKM unggulan serta tidak tertatanya dengan baik kelompok dan sentra IKM yang sudah ada
					Lokasi beberapa IKM unggulan dan berpotensi yang menyebar serta belum berbentuk kelompok	
17	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan	Kasi Pengembangan Teknologi Industri	Proses penyelesaian lahan yang lama	Tidak efektifnya pembangunan Sentra Industri Perikanan di Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan
18	Pembangunan Gedung Sentra IKM(penunjang DAK)	Menunjang penyelenggaraan kegiatan pembangunan Sentra IKM (Koordinasi, Konsultasi dan pengadaan lahan	Tidak selesainya pengurusan administrasi DAK sesuai target yang diharapkan	Kasi Pengembangan Teknologi Industri	Stakeholder yang banyak dan dari latarakang yang beragam mengakibatkan sulitnya komunikasi dan koordinasi pengurusan administrasi dan pengurusan lahan	Tidak efektifnya penyelesaian pengurusan administrasi DAK sesuai dengan target waktu yang diharapkan

19	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	pedagang menganggap dengan dilakukan pendataan berdampak negatif terhadap mereka	Tidak optimalnya data ketersediaan kebutuhan bahan pokok
20	Pelayanan Administrasi, Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar	Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar melalui Mantari Pasar	Perlunya kejujuran dan aktivitas Mantari Pasar dalam melakukan penagihan retribusi petak / kios dan pelataran terhadap pedagang	Kasi Bina Pasar	Adanya tempat yang tidak memadai (rusak), keamanan dan kebersihan pasar	Tidak tercapainya target PAD sebagaimana yang ditetapkan
21	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Kasi Bina Pasar	Rendahnya kompensasi/gaji pengelola pasar	Tidak optimalnya pengelolaan pasar
22	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Pemda, Kadis dan PPTK	Terbatasnya anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam menciptakan pasar rakyat
23	penunjang percepatan pembangunan pasar dalam Kabupaten pesisir selatan.	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Tahun 2019	Tidak tersedianya dana untuk melengkapi kebutuhan penunjang percepatan pembangunan pasar	Kasi Bina Pasar	Terbatasnya anggaran yang diperlukan untuk melengkapi sarana penunjang percepatan pelaksanaan pembangunan	Tertundanya atau terjadinya pergesern waktu pelaksanaan dimulainya pekerjaan
24	Pembuatan daabase perdagangan	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Tidak maksimalnya data yang dikumpulkan	Kasi Bina Pasar	kurangnya SDM untuk melakukan pendataan	Tidak tercapainya target dalam pendataan kondisi pasar
25	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten (DAK)	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Kasi Bina Pasar	Terbatasnya anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam menciptakan pasar rakyat
26	Penyelenggaraan Painan Ekspo	Terselenggaranya Bazar dan Pameran pada Painan Ekspo	Penyelenggaraan Bazar dan Pameran yang tidak memadai mengakibatkan tidak tercapainya sasaran pelaksanaan event	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Barang yang dipamerkan sebagian juga dipamerkan oleh Stand lainnya	Tidak tercapainya target penjualan pemilik barang pada saat pameran

27	Tertindakannya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Pedagang merasa kurang senang ketika tim melakukan pengawasan barang beredar	Tidak terpenuhinya jumlah kebutuhan barang oleh distributor / penyalur sehingga harga yang dijual sesuai dengan HET	Kasi Perlindungan Konsumen	Kurangnya kontrol Distributor atau penyalur terhadap kios pengencer	Tidak meratanya harga yang dibayar oleh masyarakat
28	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrolagian	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Kasi Perlindungan Konsumen	Masih kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan operasional Terra Ulang	Tidak tercapainya target operasi pelaksanaan operasional terra ulang pada tahun 2017
29	Pemantauan Harga dan Operasi Pasar	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Tidak samanya harga jual oleh Pedagang dengan alasan harga pokok pembelian dan ongkos angkut	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Asal dan tempat pembelian barang serta kualitas yang berbeda	Tidak diperolehnya harga tunggal untuk masing-masing jenis barang

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

SKPD : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi	Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah	Harus ada aturan yang mensyaratkan bahwa pengurus koperasi berpendidikan minimal usia	Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta sosialisasi	Cukup efektif	Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2019
2	Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Monev Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Setelah dilakukan pembinaan melalui pengawasan, bimbingan teknis dan Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Mengadakan pelatihan pemisahan peran Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Melaksanakan bimtek dan sosialisasi tentang Peraturan Menyurati Pengurus	Cukup efektif	Penambahan personil pembina koperasi yang Monev Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kepala Dinas Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2019
3	Meningkatnya pengetahuan dan akuntabilitas Pengurus Koperasi dalam mengelola keuangan koperasi	Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah, peserta yang datang tidak sesuai dengan kriteria yang diadakan	Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta bimtek	Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta bimtek	Cukup efektif	Buku Panduan Diklat	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2019
4	Meningkatnya koperasi tidak aktif menjadi aktif, aktif menjadi berkualitas dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	Adanya kekhawatiran pengurus koperasi bahwa dengan adanya kegiatan ini akan mempersalahkan bantuan dana yang masuk terdapat	Peraturan tentang pembinaan perkoperasian	Peraturan menteri koperasi tentang pembinaan perkoperasian	Cukup efektif	Surat pemberitahuan tentang rencana pembubaran koperasi	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2019
5	Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para UMKM, Menciptakan SDM UMKM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha agar dapat membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula serta mengembangkan home industri	Sebagian pelaku UMKM yang di kirim mengikutiPelatihan tidak sesuai dengan pelaku UMKM yang sudah didata / diidentifikasi sehingga tidak tercapainya sasaran dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti diklat.	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti diklat.	Cukup efektif	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2019
6	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan Jenis usaha persub sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Verifikasi data	Dibuatkan format Isian data yang harus dilengkapi UMKM	Cukup efektif	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdisetiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pelaksanaan Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
7	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya informasi permodalan bagi UMKM	Rendahnya motivasi UMKM untuk mengikuti temu mitra dan sosialisasi. Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk diinput keaplikasi SIKP-KUR	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti temu mitra dan sosialisasi, serta kriteria calon debitur KUR	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti temu mitra dan sosialisasi, serta kriteria calon debitur KUR	Cukup efektif	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	Pejabat Pelaksanaan Kegiatan	Januari s/d Desember 2019

	UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	penjualan produknya, nilai tambah dan rendahnya kualitas produk sehingga produk unggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kurang dikenal di tingkat nasional maupun internasional	identifikasi UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi	identifikasi UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi	Cukup efektif	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
9	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat Tidak terdapatnya seluruh IKM yang ada	Pendataan yang melibatkan stakeholder (Kecamatan dan Nagari setempat) dalam pendataan IKM	Melakukan pendataan langsung kelapangan	Tidak efektif	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
10	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.	Pengukuran tingkat omset dan skala usaha sebelum dan setelah dilakukan pelatihan dan promosi	Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan	Cukup efektif	Pengembangan klaster Industri kerajinan unggulan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
11	Terbitnya Perda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Pesisir Selatan 2019-2039	RPIK Pesisir Selatan kurang sosialisasi terutama pada OPD terkait (tingkat II dan kecamatan) serta masyarakat pelaku IKM	Koordinasi dan sosialisasi Perda RPIK ke OPD-OPD, Kecamatan dan masyarakat	Koordinasi dengan tim teknis	Cukup efektif	Pengawasan dan koordinasi penerapan Perda RPIK	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
12	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pengawasan tentang standar produksi yang baik	Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan	Belum Efektif	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
13	Peningkatan kualitas Industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Metode pembinaan dan pengawasan yang diberikan tidak efektif bagi IKM di kab. Pesisir Selatan	Adanya laporan perkembangan IKM, sebelum dan sesudah pembinaan	Diagnosa dan analisa permasalahan IKM	Cukup efektif	Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara berproduksi yang baik)	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019

14	Meningkatnya Skala Usaha dan Pemmodalan IKM melalui Kemitraan	Tidak adanya IKM yang bermitra	Pengawasan yang berkelanjutan bagi IKM IKM yang bermitra	Pendataan IKM yang difasilitasi Informasi kemitraan melalui temu usaha, IKM yang difasilitasi kemitraan dan IKM yang bermitra	Tidak efektif	Pengawasan yang berkelanjutan untuk menjamin kepercayaan dan citra baik pihak yang bermitra	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
15	Meningkatnya sumber daya IKM dibidang teknologi industri	IKM tidak konsisten menerapkan metode / teknik produksi baru yang diberikan pada saat Bimtek Teknologi Industri	Monev terhadap hasil Bimtek	Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan	Belum Efektif	Seleksi terhadap IKM yang benar benar sanggup dan mampu dalam menerapkan teknologi produksi yang dimaksudkan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
16	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Sentra tidak bertahan lama dan penyelenggaraan sentra nantinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Efektifitas penguatan sentra dan kelompok IKM yang berpotensi sebagai sentra melalui pembinaan yang berkelanjutan	Telah terbentuknya beberapa kelompok Industri dan sentra yang sudah berlegalitas	Cukup efektif	Fasilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait, di tingkat kecamatan maupun nagari	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
17	Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan	Adanya Tim Pengawas/ UPTD Sentra IKM Perikanan di Pesisir Selatan	Menyediakan biaya Penunjang Pembangunan Gedung Sentra IKM		Pengawasan Sentra yang berkelanjutan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
18	Menunjang penyelenggaraan kegiatan pembangunan Sentra IKM (Koordinasi, Konsultasi dan pengadaan lahan	Tidak selesainya pengurusan administrasi DAK sesuai target yang diharapkan	Koordinasi yang lebih baik	Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder	Cukup efektif	Koordinasi yang lebih baik	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
19	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pemantauan berkala	Cukup Efektif	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Des 2019
20	Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar melalui Mantari Pasar	Perlunya kejujuran dan aktivitas Mantari Pasar dalam melakukan penagihan retribusi petak / kios dan pelataran terhadap pedagang	Dilakukannya pengurangan petak toko / kios yang rusak atau kosong dalam target retribusi	Dilakukannya pemantauan petak / kios yang kosong / tidak dihuni oleh pedagang karena rusak atau	Cukup Efektif	Melakukan pendataan dan monitoring terhadap petak petak yang tidak layak huni	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Des 2018
21	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Dilakukan evaluasi terhadap pengelola pasar	Dilakukan pengawasan terhadap pegelola pasar	Cukup Efektif	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	

	dalam Kabupaten Pesisir Selatan	pasar dengan standar SNI	untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI		pelaksanaan kegiatan	Kegiatan		
23	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Tahun 2019	Tidak terdapatnya dana untuk melengkapi kebutuhan penunjang pembangunan pasar	Mencukupi anggaran yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan pembangunan	Dilaksanakannya peningkatan pembangunan sarana penunjang fisik utama	Cukup Efektif	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Des 2019
24	Terdapatnya Data Base Perdagangan yang valid	Sebagian Pedagang tidak mau memberikan informasi tentang pasar	Pendataan yang melibatkan stakeholder / Kecamatan	Melakukan pendataan langsung kelapangan	Tidak efektif	Pendataan yang cukup dan partisipatif (personil)	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
25	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI			-	Pengawasan yang berkelanjutan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2019
26	Terlaksananya Bazar dan Pameran pada Pekan Ekspo	Penyelenggaraan Bazar dan Pameran yang tidak memadai mengakibatkan tidak tercapainya sasaran pelaksanaan event	Tidak mengikut sertakan produk dan bahan dan bentuk yang sama dengan produk daerah lainnya	Merencanakan produk unggulan yang akan diikuti sertakan dalam event yang akan datang	Cukup Efektif	Menyeleksi produk unggulan yang diikuti sertakan dalam event	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Mai 2018
27	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Pedagang merasa kurang senang ketika tim melakukan pengawasan barang beredar	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap barang beredar yang diproses oleh Distributor	Melakukan pengawasan barang beredar setiap bulannya,	Cukup Efektif	Meningkatkan pengawasan dan mengikut sertakan ASN yang memiliki sertifikat PPKS	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Des 2019
28	Terdapatnya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional kamertispogan	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Melengkapi peralatan operasional kebutuhan Terra Ulang	Cukup Efektif	Melengkapi peralatan operasional dan peningkatan SDM	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Des 2019
29	Terdapatnya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Tidak adanya harga jual oleh Pedagang dengan alasan harga pokok pembelian dari supplier kecil	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Melakukan pembinaan kepada pedagang yang menaikkan harga diatas kewajaran	Cukup Efektif	Melakukan pemantauan dan monitoring harga	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Des 2019

Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian

SKPD : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian yg Direncanakan	Media/ Bentuk/ Sarana/ Pengumukhaiban	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.	Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta	surat	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	Mei 2019
2	Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Peraturan - peraturan tentang perkoperasian	Mengadakan pelatihan pemisahan neraca dan pengawasan secara berkelanjutan serta menerapkan aturan dan sanksi	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	April dan Juni 2019
	Meningkatnya pengetahuan dan akuntabilitas Pengurus Koperasi dalam mengelola keuangan koperasi	Mengadakan sosialisasi Izin usaha Simpan Pinjam Koperasi	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	April s/d Agustus 2019
3	Meningkatnya pengetahuan dan akuntabilitas Pengurus Koperasi dalam mengelola keuangan koperasi	Buku Panduan Diklat	pertemuan	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi,	Agustus 2019
4	Meningkatnya koperasi tidak mejadi aktif, aktif menjadi berkualitas dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	Surat pemberitahuan tentang rencana pembubaran koperasi	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi, camat, wali nagari	Februari- november 2019
5	Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para UMKM, Menciptakan SDM UMKM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha agar dapat membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula serta mengembangkan home Industri	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Januari s/d Desember 2019
6	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdiseitap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Koordinasi Wali Nagari, Camat dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Januari s/d Desember 2019

7	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN. Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan. Tersosialisasikannya informasi	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Januari s/d Desember 2019
8	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	UMKM Calon Penerima Bantuan, Pihak Rekanan	Januari s/d Desember 2019
9	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM, OPD yang membutuhkan, Perindag Provinsi, BPS, Kementerian	Januari s/d Desember 2019
10	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan	Pengembangan klaster Industri kerajinan unggulan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian/ Dekranasda)	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	Januari s/d Desember 2019
11	Terbitnya Perda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Pesisir Selatan 2019-2039	Pengawasan dan koordinasi penerapan Perda RPIK	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Perindustrian	Masyarakat dan Pemerintah	Januari s/d Desember 2019
12	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM, LPOM-MUI, Baristand, Kemenkumham, Pihak	Januari s/d Desember 2019
13	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan	Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara berproduksi)	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM	Januari s/d Desember 2019
14	Meningkatnya Skala Usaha dan Permodalan IKM melalui Kemitraan	Pengawasan yang berkelanjutan untuk menjamin kepercayaan dan citra baik pihak pihak yang bermitra	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM	Januari s/d Desember 2019
				Pihak Swasta, BUMN, BUMD	IKM, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	

15	Meningkatnya sumber daya IKM di bidang teknologi industri	Seleksi terhadap IKM yang benar benar sanggup dan mampu dalam menerapkan teknologi produksi yang dimaksudkan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	Kelompok IKM	Januari s/d Desember 2019
16	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Fasilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait, di tingkat kecamatan maupun nagari	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	OPD terkait, masyarakat pelaku IKM	Januari s/d Desember 2019
17	Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengawasan Sentra yang berkelanjutan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	OPD terkait, masyarakat pelaku IKM	Januari s/d Desember 2019
18	Menunjang penyelenggaraan kegiatan pembangunan Sentra IKM (Koordinasi, Konsultasi dan pengadaan lahan)	Koordinasi yang lebih baik	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	OPD terkait dan kecamatan	Januari s/d Desember 2019
				Kementerian Perindustrian	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	
				Kementerian Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan	
				Dinas Perindag Propinsi Sumbar	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	
19	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Menghubungi dan memantau langsung ke lokasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir Selatan	Masyarakat dan Pemilik UMKM / IKM	Januari s/d Desember 2019
20	Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar melalui Mantari Pasar	Dilakukannya pengurangan petak toko / kios yang rusak atau kosong dalam target retribusi	Karcis (barang kuasi), kwitansi/ pembayaran	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pendapatan Daerah	Mantari Pasar, Kemanan Pasar, Walinagari, Camat, Badan Pendapatan Daerah	Januari s/d Desember 2019
21	Terlaksananya pengelolaan dan pengamanan pasar	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pemantauan langsung	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pendapatan Daerah	Mantari Pasar, Kemanan Pasar, Walinagari, Camat, Badan Pendapatan Daerah	Januari s/d Desember 2019
22	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana pasar	Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KIA/PPAS	Dinas Koperindg, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan	Masyarakat, walinagari, Camat serta Ninik	Januari s/d Desember 2019

23	Tersedianya Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Tahun 2019	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pembuatan DED, rapat - rapat persiapan akan dimulainya pekerjaan	Dinas Koperindag, UL7, Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan	Masyarakat dan Pihak ke II, Camat, MUSPIKA, Besserta, Malindagan dan Klinik Nelayan Kecamatan Bawakan	Januari s/d Desember 2019
24	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Pendataan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder	menakukan pendataan angpung	Koordinasi Menteri Pasar, Wali Negeri, Camat dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Masyarakat, Pedagang, Bkwas Pasar	Januari s/d Desember 2019
25	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	menengkapi penyarsan administrasi penyerahan lahan sesegera mungkin agar lahan tersebut sudah bebas untuk dilakukan pembangunan pasar	Pembuatan DED, rapat - rapat persiapan akan dimulainya pekerjaan	Dinas Koperindag, UL7, Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan	Masyarakat dan Pihak ke II.	Januari s/d Desember 2019
26	Terselenggaranya Bazar dan Pameran pada Pohon Elcidu	Menyeksi produk unggulan yang dikukertakan dalam event	Brosur, Media Elektronik, Media Massa	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir Selatan	Masyarakat dan Pemilik UMKM / IKM	Januari s/d Desember 2019
27	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap barang beredar yang dimiliki Distributor	Surat Edaran Kebutuhan barang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan	Distributor dan Agen Penyalur	Distributor, Penyalur, pengedar dan masyarakat	Januari s/d Desember 2019
28	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Sosialisai kepada pedagang tentang Terra Ulang	Distributor dan Agen Penyalur	Kapala UPTD Metrologi	Januari s/d Desember 2019
29	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Papan informasi harga, Sosialisai, Media Sosial	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir Selatan	Masyarakat, Instansi terkait	Januari s/d Desember 2019

No	Tupai yang Diidentifikasi	Unit Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Informasi dan komunikasi	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif yang Diambil
					Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pemahaman Pengurus Koperasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang koperasi	Mengadakan Pelatihan Akuntansi berbasis Komputerisasi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Bidang Koperasi dan UKM	Sudah ada	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	
2	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi serta memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi	Meningkatkan pembinaan melalui pengawasan dan pelatihan-pelatihan	Pengawas langsung ke Koperasi-koperasi		Pengawas langsung ke Koperasi-koperasi	Kalind Koperasi dan UKM, Kasi beserta staf	1 kali per koperasi per tahun	
	Meningkatkan kepatuhan dan disiplin anggota koperasi	Mengadakan Sosialisasi dan Visita Simpul Piyaji Koperasi	Monitoring dan evaluasi KOP/USP yang memiliki Visita Simpul Piyaji Koperasi		Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun per koperasi	
3	Meningkatkan pengetahuan dan akuntabilitas Pengurus Koperasi dalam mengelola keuangan koperasi	Mengikutsertakan pengurus koperasi dalam mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif	Belum Ada		Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	
4	Meningkatkan kesadaran Pengurus Koperasi untuk melaksanakan langkah-langkah revitalisasi secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, sehingga diharapkan meningkatkan kinerja koperasi aktif dan koperasi berkeadilan	Mengikutsertakan pengurus koperasi dalam mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif	Sudah ada		Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	
5	Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para UKM. Menciptakan UKM-UKM yang produktif, kreatif sebagai basis dalam berwirausaha agar dapat meningkatkan earning base dan menciptakan wirausaha pemula serta mengembangkan kemitraan	Memberikan pembinaan dan pelatihan baik formal maupun informal serta melakukan pendataan secara berkala kepada Pelaku UKM	Sudah ada		Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	
6	Memastikan Data Base UKM yang valid dan akurat yang dapat terus diperbarui	Sosialisasi pendataan UKM kepada pelaku UKM/Asosiasi Nagari/Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Selatan	Sudah ada		Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	

Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha	
Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha		Kerangka Kerja Pengembangan Usaha	
8	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku UMKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran UMKM produk unggulan daerah	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan	Sudah ada		Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun		
9	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Belum ada		Validasi data IKM serta verifikasi data IKM di tingkat Kecamatan	Kasi / PPTK bersangkutan	12 Bulan		Koordinasi yang lebih aktif dengan kecamatan dan nagari dalam memberikan informasi data IKM aktif dan tidak aktif lagi (mati)
10	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan	Pengembangan klaster industri kerajinan unggulan dengan dukungan aktif seluruh stakeholder	Pembinaan langsung dan keikutsertaan aktif dalam berbagai pelatihan baik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi/Kab. Pessel, Provinsi Sumbar maupun Kementerian Perindustrian	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	8 kali setahun		Perlu pembinaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang terfokus terhadap keberlangsungan usaha kerajinan
11	Terbitnya Perda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Pesisir Selatan 2019-2039	Sosialisasi Perda RPIK pada masyarakat dan semua stakeholder yang terkait untuk kemudian dilakukannya pengawasan dan pengendalian berkelanjutan	Belum ada	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, OPD terkait di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Prov. Sumbar, Univ Andalas, Kemenkumham, kemendagri dan Kemenperin	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	1 kali setahun		Penyusunan peta potensi Industri yang lebih menyeluruh dan terintegrasi antar semua OPD di Kabupaten Pesisir Selatan
12	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	Kolaborasi dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan Industri guna memberikan pemahaman bagaimana cara berproduksi yang baik dan sesuai standar	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	satu kali setelah terbit		Pembinaan yang lebih terintegrasi dengan OPD lain yaitu Dinas Kesehatan, Kantor Pajak, dan Bidang Perizinan DPMPTSP mengenai persyaratan-persyaratan berproduksi dan standar
13	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Pembinaan yang berkelanjutan	Pengawasan yang berkelanjutan dan lebih fokus pada IKM potensial	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi		Diperlukannya upgrade pengetahuan mengenai teknik dan metode pembinaan terhadap personel
14	Meningkatnya Skala Usaha dan Permodalan IKM melalui Kemitraan	Pengawasan yang berkelanjutan untuk menjamin kepercayaan dan citra baik pihak pihak yang bermitra	Pengecekan langsung potensi IKM untuk bermitra	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab Pessel,	Pemantauan dan pengawasan terhadap IKM yang bermitra secara berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi		Jenis kemitraan yang lebih meluas, bukan hanya permodalan tetapi juga aspek

No	Peningkatan kinerja sumber daya UKM dibidang Industri-industri	Peningkatan dan pengembangan pembinaan dan pemberdayaan melalui layanan dan teknologi industri yang diberikan pada saat pelatihan	Sudah ada (berdasarkan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan)	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Disdag Perindustrian) melalui sat/Tripa, e-mail, Whatsupp	Peningkatan Berkelanjutan	Kasus / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	Keterlibatan pengembangan, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan UKM yang ada, yang akan dilaksanakan oleh dinas yang bersangkutan, dan yang akan dilaksanakan oleh dinas yang bersangkutan
16	Peningkatan sentra sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sesuai dalam satu wilayah melalui berbagai bentuk manajemen industri dag kelompok UKM	fasilitasi kegiatan Perutusan dan Perumudharan kelompok UKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait di tingkat kecamatan maupun tingkat	Perutusan dan pembinaan langsung ke UKM dan validasi data kelompok ke Wali nagari setempat	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab Pessel, Kecamatan, Nagari dan OPD lain terkait di kab Pessel, Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat	Pemantauan yang lebih fokus melalui forum perkembangan kelompok UKM untuk kemudian dipilih kelompok UKM yang berpotensi sentra dan untuk kemudian di bentuk Sentra UKM	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	Peningkatan pemahaman personil perindustrian mengenai sentra UKM, kelompok UKM, kluster, dll
17	Pembangunan sentra UKM Perikanan diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengawasan terhadap pembangunan sentra dan segala atributnya secara menyeluruh dan berkelanjutan	Pengawasan langsung terhadap pembangunan fisik dan semua hal yang terkait	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab Pessel, OPD Terkait (PU-Tarkim), Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat dan Kemempria	Pemantauan langsung dan berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	Keterlibatan seluruh kegiatan Bidang Perindustrian untuk lebih fokus dalam pembinaan UKM perikanan yang akan dijadikan sentra
18	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan Sentra UKM (Koordinasi, Konsultasi dan pengadaaan lahan)	Koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan pihak terkait	Belum ada	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab Pessel, OPD Terkait (PU-Tarkim),	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Koordinasi	Koordinasi yang berkelanjutan
19	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Lansung ke Lokasi	Sudah ada	Mengikuti acara bazar / pameran	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
20	Terlaksananya Pengalihan Retribusi Pasar melalui Matrik Pasar	Dilaksukannya pengurangan pajak toko / kios yang rusak atau kosong dalam target retribusi	Lansung ke Lokasi Pasar	Sudah ada	Lansung ke Lokasi Pasar	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
21	Terlaksananya pengelolaan dan pengangkutan dasar	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap pengelola pasar (matrik, petugas kebersihan dan petugas keamanan)	Lansung mengunjungi petugas/ pengelola pasar	Sudah ada	Lansung mengunjungi petugas/ pengelola pasar	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
22	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pessel Selatan	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhi standar SW	Lansung ke Lokasi pembangunan	Sudah ada	Lansung ke Lokasi pembangunan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
23	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Tahun 2023	Melakukan anggaran yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan pembangunan	Lansung ke Lokasi pembangunan	Sudah ada	Lansung ke Lokasi pembangunan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
24	Terlaksananya Cara Bae Perdagangan yang baik	Pendataan yang cukup dan menambahkan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder	Sudah ada		Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	

25	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pemali Selatan	melengkapi persyaratan administrasi: perizinan lahan sesegera mungkin agar lahan tersebut sudah bebas untuk dilakukan pembangunan pasar	Lansung ke Lokasi pembangunan	Sudah ada	Lansung ke Lokasi pembangunan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
26	Terselenggaranya Bazar dan Pameran pada Paiman Ekspo	Menyediakan produk unggulan yang disertakan dalam event	Lansung kepada INKIM dan UMKM	Sudah ada	Lansung kepada INKIM dan UMKM	Kasi / PPTK bersangkutan	Pada tahap persiapan, pelaksanaan	
27	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap barang beredar yang dipasok oleh Distributor	Lansung mengunjungi Distributor / Penyalur	Sudah ada	Lansung mengunjungi Distributor / Penyalur	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
28	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Lansung ke kantor Metrologi	Sudah ada	Lansung ke kantor Metrologi	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
29	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Lansung kepada Penjual	Sudah ada	Lansung kepada Penjual	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	

terangan :

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4. Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5. Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6. Kolom 6 Cukup jelas
7. Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut